



KOMUNIKA, P-ISSN [2615-112X], E-ISSN [2615-5206]
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/komunika>
DOI:<http://dx.doi.org/10.24042/komunika.v1i1.2753>
Volume 1, No. 1, Juni 2018, halaman 1 – 32

DINAMIKA ISLAM INDONESIA: MEDIA MASSA SEBAGAI INSTRUMEN GERAKAN

Abdullah Khusairi

IAIN Imam Bonjol Padang
abdullahkhusairi@yahoo.com

Abstract: *The history of Islamic dynamics in Indonesia has been widely seen through educational instruments, trade routes, and networks of tarekat scholars. Still few see the mass media as a motion instrument. In fact, growing Islamic thoughts and movements in a place, also possible occurred on the insiprasi elsewhere through the mass media. The character of mass media capable of arousing the public subconscious has been used by Muslim scholars to jointly build a line against colonialism and liberate the nation. The mass media of colonialism became a means of struggle. Wahana conveyed his aspirations to the government and also played a role in educating the community. Unlike now, where the mass media has become a larger industry, in the past, the print media media in particular became the foundation of the actual information rides for the intellectuals who have not put forward the industry side*

Abstrak: *Sejarah dinamika Islam di Indonesia telah banyak dilihat melalui instrumen pendidikan, rute perdagangan, dan jaringan para sarjana tarekat. Masih sedikit yang melihat media massa sebagai alat gerak. Bahkan, berkembangnya pemikiran dan gerakan Islam di suatu tempat,*

juga dimungkinkan terjadi pada insiprasi tempat lain melalui media massa. Karakter media massa yang mampu membangkitkan alam bawah sadar publik telah digunakan oleh para sarjana Muslim untuk bersama-sama membangun garis melawan kolonialisme dan membebaskan bangsa. Media massa kolonialisme menjadi sarana perjuangan. Wahana menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dan juga berperan dalam mendidik masyarakat. Tidak seperti sekarang, di mana media massa telah menjadi industri yang lebih besar, di masa lalu, media media cetak khususnya menjadi tumpuan informasi yang sebenarnya bagi para intelektual yang belum mengedepankan sisi industri.

Keywords: *History, Islam, Government*

A. Pendahuluan

Sejarah dinamika Islam di Indonesia telah banyak dilihat melalui instrumen pendidikan, jalur perdagangan, dan jejaringan ulama tarekat.¹ Masih sedikit yang melihat media massa sebagai instrumen gerakan. Padahal, tumbuh berkembang pemikiran dan gerakan Islam di suatu tempat, juga dimungkinkan terjadi atas insiprasi di tempat lain melalui media massa. Watak media massa yang mampu menggugah alam bawah sadar publik telah digunakan oleh cendikiawan muslim untuk bersama-sama membangun barisan melawan kolonialisme dan memerdekakan bangsa.

Media massa pada masa kolonialisme menjadi alat perjuangan. Wahana menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan dan juga berperan mendidik masyarakat. Tidak seperti sekarang, dimana media massa sudah menjadi industri yang lebih besar, pada masa dulu, media media cetak khususnya menjadi tumpuan wahana informasi aktual bagi kaum cendikiawan yang belum mengedepankan sisi industri.

Melihat jalur *geanologi* intelegensia melalui pendidikan guru-murid dan media massa pada dasarnya punya kesamaan. Hanya saja media massa memungkinkan inspirasi lahir dari seseorang yang dianggap idola dari pembaca media massa yang tidak bertemu langsung dan berguru, hanya bertemu lewat karyanya di media massa. Seperti dinamika ummat Islam di

¹Lebih lengkap dalam, Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, (Bandung: Mizan, 1998). Edisi terbaru buku ini, lebih fokus pada jaringan tarekat atau sufisme.

nusantara, selain karena keterhubungan melalui pendidikan, juga terinspirasi melalui media massa² dengan pemikiran dan gerakan Islam yang dilakukan Jamaluddin al-Afghani³ (1838–1897) dan Muhammad Abduh (1849 – 1905).⁴ Dua tokoh yang memiliki pemikiran dan gerakan untuk membebaskan negeri-negeri Islam dari cengkraman kolonialisme.

Mereka menerbitkan surat kabar *al-'Urwah al-Wutsqo* pada tahun 1884 di Prancis. Walau hanya terbit selama delapan bulan, dengan 18 edisi -- 13 Maret 1884 - 17 Oktober 1884 --- namun gaungnya dalam menentang kolonialisme melebar ke penjuru dunia, termasuk Indonesia. *al-'Urwah al-Wutsqo* diberhentikan secara paksa oleh negara-negara Barat yang saat itu menguasai negeri-negeri muslim pada saat itu.

Rasyid Ridha (1865-1935),⁵ murid Al-Afghani dan Muhammad Abduh, meneruskan cita-cita sang guru dengan menerbitkan surat kabar *al-*

²Azyumardi Azra, *Transmission of al-Manar Reformisme to the Malay-Indonesian World: the case of al-Imam and al-Munir*, (New York & Canada, Routledge, 2006). Lihat dalam Stephane A. Dugoinon, Komatsu Hisao and Kosugi Yasushi (ed), *Intellectuals in the Modern Islamic World, Transmission, Transformation and Communication, New Horizon in Islamic Studies*, (London And New York: Routledge, 2006).

³Nama lengkap, Jamaluddin al-Afghani as-Sayyid Muhammad bin Shafdar al-Husain. Lahir di Afghanistan tahun 1839, meninggal di Istanbul tahun 1897. Lahir dari keluarga yang menganut Mazhab Hanafi. Ketika berusia 22 tahun, menjadi pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Pada tahun 1864, ia menjadi penasihat Sher Ali Khan. Kemudian menjadi Perdana Menteri. Pada masa karier politiknya ini, Inggris sudah mulai ikut campur dalam urusan politik Afghanistan, ia tak menyukainya. Sejak itu ia membenci kolonialisme. Lihat Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 43-48.

⁴Nama lengkapnya Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Lahir di Desa Mahallat Nasr, al-Buhairah, Mesir, pada tahun 1849. Pada usia 13 tahun, Abduh dikirim ayahnya ke Masjid al-Ahmadi Thantha, sekitar 80 km dari Kairo untuk mempelajari al-Qur'an dan tajwidnya. (Harun Nasution, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasionalisme Mu'tazilah*, (Jakarta: UI-Press, 1987). Lihat juga dalam Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...*, h. 49-59.

⁵Nama lengkap, Muhammad Rasyid bin Ali Ridha bin Syamsuddin bin Baha'uddin Al-Qalmuni Al-Husaini. Lahir di al-Qalamun, suatu desa di Lebanon, tahun 1865. Wafat tahun 1935). Ridha mempelajari kelemahan-kelemahan masyarakat muslim saat itu, dibandingkan masyarakat kolonialis Barat, dan menyimpulkan bahwa kelemahan tersebut antara lain kecenderungan umat untuk mengikuti tradisi secara buta (taqlid), minat yang berlebihan terhadap dunia sufi dan kemandegan pemikiran ulama yang mengakibatkan timbulnya kegagalan dalam mencapai kemajuan di bidang sains dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kelemahan ini dapat diatasi dengan kembali ke prinsip-prinsip dasar Islam dan melakukan ijtihad dalam menghadapi realita modern. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...*, h. 60-67.

Manar di Mesir. Suara pembebasan dari kolonialisme disampaikan melalui *al-Manar*. Bersama sang guru, Muhammad Abduh, majalah mingguan *al-Manar*, menyebarkan ide-ide pembaharuan dalam bidang agama, sosial, dan ekonomi, memajukan umat Islam dan menjernihkan ajaran Islam dari segala paham yang menyimpang, serta membangkitkan semangat persatuan umat Islam dalam menghadapi berbagai intervensi dari luar. Dalam perjalanannya majalah ini banyak mendapat sambutan, karena ide-ide pembaharuan yang dilontarkan dalam setiap tulisannya.

Rasyid Ridha mengajukan saran kepada gurunya, agar menafsirkan kitab suci al-Quran dengan penafsiran yang relevan dengan perkembangan zaman. Melalui kuliah tafsir yang rutin dilakukan di Universitas Al-Azhar, Rasyid Ridha selalu mencatat ide-ide pembaharuan yang muncul dalam kuliah yang diberikan Muhammad Abduh. Selanjutnya, catatan-catatan itu disusun secara sistematis dan diserahkan kepada sang guru untuk diperiksa kembali. Selesai diperiksa dan mendapat pengesahan, barulah tulisan itu diterbitkan dalam majalah *al-Manar*. Kumpulan tulisan mengenai tafsir yang termuat dalam majalah *al-Manar* inilah yang kemudian dibukukan menjadi *Tafsir al-Manar*, di kemudian hari. Kasugi Yasushi menyebutkan, *Tafsir al-Manar* sumbangan terbesar untuk dunia Islam dan ilmu pengetahuan, selain validasi keislaman yang ditawarkan oleh Abduh, yang tentunya masih memiliki perbedaan signifikan dengan sang murid, Ridha. Ridha tidak konfrontatif seperti sang guru, ia memilih jalan perjuangan Islam dengan pendidikan. Sang Guru, Abduh sangat berani dan konfrontatif terhadap kolonial, seperti Jamaluddin al-Afgani.⁶

Pengaruh dua surat kabar itu sampai ke nusantara. Ini ditunjukkan dengan lahirnya majalah *al-Imam* di Temasek, Singapura. Malah *al-Imam*, secara fisik dan pemikiran yang dibawanya sama seperti *al-Manar*. Lagi-lagi mengkritik kolonialisme dan ajakan untuk memerdekakan diri. Senasib dengan *al-'Urwah al-Wutsqo*, *al-Imam* terhenti penerbitannya, selain karena alasan ekonomi dalam penerbitan juga membuat gerah pemerintah kolonial. Terhentinya *al-Imam*, seorang muslim Minangkabau menemui pemilik *al-Imam*, untuk menerbitkan *al-Munir* di Padang. Pemasaran *al-Manar*, diteruskan untuk menjual majalah baru, *al-Munir*.

⁶Kasugi Yasushi, *Al-Manar Revisited: The Lighthouse of the Islamic Revival*, (New York & Canada, Routledge, 2006). Lihat juga Stephane A. Dugoignon, Komatsu Hisao and Kosugi Yasushi, *Intellectuals in the Modern ...*

Adalah Abdullah Ahmad (1878-1933), bersama Abdul Karim Amrullah (ayah Buya Hamka), Muhammad Thaib Umar dan Sutan Muhammad Salim (ayah Agus Salim), menerbitkan *al-Munir* tersebut. Pembaca pada masa itu mengindentikkan *al-Munir* kepada *al-Imam*. Sedangkan Majalah *al-Imam* diidentikkan pembacanya dengan *al-Manar*. Ketika *al-Imam* berhenti terbit, lahirnya *al-Munir*, keagenan pemasaran *al-Imam* dipakai *al-Munir*. Lagi-lagi *al-Munir* harus berhenti terbit karena alasan ekonomi. Banyaknya pelanggan yang tidak mengirim dana penerbitan, walau sudah berkali-kali diumumkan di majalah tersebut.

Saat *al-Munir* berhenti terbit, lahir pula *al-Munir al-Manar* berbasis di lembaga pendidikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang.⁷ Disusul dengan *al-Akbar*, yang berbasis di Adabiyah School, *al-Bayan* di Parabek, *al-Basyir* di Sungayang, *al-Ittiqan* di Maninjau. Setelah itu, muncul pula *Suluh Melayu* dan *al-Mizan* yang mengusung corak agama konservatif, dijuluki Kaum Tua.⁸

Berdiri dan berkembangnya Sarekat Islam sebagai organisasi massa, Ketua Sarekat Islam⁹ Tjokroaminoto mendirikan majalah *al-Islam* di Surabaya tahun 1916. Salah satu dewan redaksinya dari *al-Munir*, Abdul Karim Amrullah. Majalah *al-Islam* mengibarkan gerakan kemerdekaan di tengah media massa yang sudah ada.

Makalah ini akan menelisik lebih jauh dinamika Islam Indonesia dengan melihat media massa sebagai salah satu instrumen gerakan, hingga ke masa paling aktual, masa kini. Serta memberi pemikiran tentang strategi bermedia massa di masa depan.

B. Pembahasan

1. Surat Kabar di Masa Kolonialisme

Surat kabar di nusantara sudah hadir sejak abad 17, diterbitkan secara terbatas oleh pemerintah kolonial di bawah kepemimpinan Gubernur

⁷Lebih lanjut lihat Yulianto Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau 1859-1945*, (Jakarta: Gramedia, 2013).

⁸Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1940* (Jakarta: LP3ES, 1982). Lihat juga dalam Mafri Amir, *Historiografi Pers Islam Indonesia*, (Jakarta: Quantum, 2000).

⁹Sejarah Serikat Islam dapat dibaca di antaranya di dalam Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980). Juga dapat dibaca dalam Jajat Burhanudin, *Ulama & Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Mizan Publik, 2012).

Jenderal Van Imhoff. Surat kabar ini masih berbahasa Belanda. Berita yang dimuat pada surat kabar, masih seputar negara Eropa, seperti Polandia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Inggris dan Denmark. Terbitan berkala pertama bernama, *Kort Bericht Eropa*, dicetak tahun 1676. Sedangkan surat kabar yang dapat dinikmati oleh publik tertentu, *Bataviase Nouvelles*, yang hadir pada tahun 1744. Sesudah itu, 23 Mei 1780 terbit *Vendu Nieuws*, atau 40 tahun setelah kehadiran *Bataviase Nouvelles*.

Surat kabar harian pertama di Batavia adalah *Bataviasche Koloniale Courant*, terbit di Batavia tahun 1810. Surat kabar-surat kabar ini masih berbahasa Belanda dan dinikmati golongan tertentu. Kemudian pada tahun 1828 terbit *Javasche Courant* di Jakarta yang memuat berita-berita resmi pemerintahan, berita lelang dan berita kutipan dari harian-harian di Eropa.

Mesin cetak pertama di Indonesia dibawa oleh seorang warga Belanda bernama W. Bruining dari Rotterdam yang kemudian menerbitkan surat kabar bernama *Het Bataviasche Advertantie Blad*. Surat kabar ini memuat iklan-iklan dan berita-berita umum yang dikutip dari penerbitan resmi di Nederland (*Staatscourant*). Surat kabar pada abad 17 dan 18 masih berbentuk sederhana, baik penampilan *design grafis* dan *layout* maupun mutu. Ketika di Eropa mulai marak usaha penerbitan, para pengusaha persuratkabaran serta para kuli tinta asal Belanda sejak masa awal pemerintahan VOC, sudah berani membuka usaha dalam bidang penerbitan berkala dan surat kabar di Batavia. Tidak hanya di Batavia, Jakarta hari ini, surat kabar berkembang tetapi juga di Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Daerah ini, dicatat sebagai daerah yang paling tua untuk mengenal surat kabar.

Nasrul Azwar (2007) dalam artikelnya berjudul *Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu*, mengutip Suryadi (2004) menulis, orang Padang bukan kemarin sore mulai membaca koran. Sejak 7 Desember 1864, orang Minang untuk pertama kalinya membaca surat kabar berbahasa melayu. Pada bulan itu, edisi perdana *Bintang Timoer* diluncurkan. Itulah koran pribumi pertama (*vernacular press*), yang banyak menyampaikan persoalan adat dan kehidupan agama.

Khairul Jasmi (2002) dalam artikel yang sangat panjang berjudul *Surat Kabar Minang, Konfigurasi Pemikiran yang Menakjubkan*, menyatakan pers (media cetak) di Sumatera Barat adalah pers yang relatif tua. Ditandai dengan terbitnya, *Soematra Courant*, *Padang Handelsblad* dan *Bentara Melajoe*. Sejak 1859 sampai kemerdekaan, tercatat 81 penerbitan di Minangkabau. Hendra Naldi (2008) dan Yuliandre Darwis

(2013) juga menyatakan, penerbitan surat kabar di Minangkabau sebuah gerakan pemikiran untuk memerjuangkan kemerdekaan.¹⁰

Selain daerah Sumatera Barat, surat kabar juga terbit di Surabaya, tahun 1835. Namanya, *Soerabajash Advertentieblad*, yang berganti nama menjadi *Soerabajash Niews en Advertentieblad*. Di Semarang terbit *Semarangsche Advertentieblad* dan *Semarangsche Courant*. Sedangkan di Ujung Pandang, terbit *Celebe Courant* dan di Makasar, *Makassaarch Handelsblad*. Surat-surat kabar yang terbit pada masa ini tidak mempunyai arti secara politis, karena lebih merupakan surat kabar periklanan. Tirasnya tidak lebih dari 1000-1200 eksemplar setiap kali terbit. Semua penerbit terkena peraturan, setiap penerbitan tidak boleh diedarkan sebelum diperiksa oleh penguasa setempat. Pada tahun 1885 di seluruh daerah yang dikuasai Belanda terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda, dan 12 surat kabar berbahasa melayu di antaranya adalah *Bintang Barat*, *Hindia-Nederland*, *Dinihari*, *Bintang Djohar*, *Selompret Melayu* dan *Tjahaja Moelia*, *Pemberitaan Bahroe* (Surabaya) dan surat kabar berbahasa jawa *Bromartani* yang terbit di Solo.¹¹

Memasuki abad 20, tepatnya di tahun 1903, koran mulai menghangat dan semarak. Masalahnya soal politik dan perbedaan paham antara pemerintah dan masyarakat mulai diberitakan. Beberapa kebijakan mulai dikritisi. Misalnya, peraturan sentralisasi kekuasaan (*centralisatie wetgeving*).

Pemerintah Belanda bisa melunak kalau sebuah masalah sudah dimuat di surat kabar. Bahkan petinggi pemerintah mulai terbuka atas kritik dan saran. Banyak sekali surat kabar menyajikan ruang surat pembaca untuk menampung aspirasi. Apalagi ketika sudah ada perwakilan rakyat buatan Belanda (*Volksraad*), pada tahun 1916. Berita politik mulai marak, kritik-kritik mulai berani disuarakan melalui surat kabar.

Adalah surat kabar *Medan Prijaji* terbit pada tahun 1903, sebuah surat kabar pertama yang dikelola kaum pribumi yang mulai berani mengkritisi kebijakan pemerintah. Munculnya surat kabar ini bisa dikatakan merupakan masa permulaan bangsa Indonesia terjun dalam dunia media massa yang berbau politik. Pemerintah Belanda menyebutnya *Inheemsche*

¹⁰Mafri Amir, *Historiografi Pers....* Bandingkan dengan Hendra Naldi, *Booming Surat Kabar di Sumatra's Westkust* (Yogyakarta: Ombak, 2008).

¹¹Mas'oeed Abidin, *Ensiklopedia Minangkabau*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005).

Pers (Pers Bumiputra). Pemimpin redaksinya, R.M. Tirtoadisuryo¹² yang dijuluki Nestor Jurnalistik. Bagian usaha, wartawan, sirkulasi, semuanya diisi oleh pribumi. *Medan Prijaji* dengan moto *Orgaan bagi bangsa jang terperintah di Hindia Olanda tempat membuka suaranya*, dipandang sangat berani dengan pemerintah hindia Belanda. Kata-kata ini telah membuka mata masyarakat, bahwa bangsa pribumi adalah bangsa yang dijajah. *Medan Prijaji* disambut kaum pergerakan yang mendambakan kebebasan mengeluarkan pendapat. *Medan Prijaji* menginspirasi lahirnya *Oetoesan Hindia*, corong organisasi besar Serikat Islam tahun 1913. Sementara itu, tokoh Serikat Islam lainnya, Semaun --- kelak beraliran komunis, menerbitkan surat kabar dengan nama yang cukup revolusioner *Api*, *Halilintar* dan *Nyala*.

Suardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara juga telah mengeluarkan koran dengan nama yang tidak kalah galaknya, yakni *Guntur Bergerak* dan *Hindia Bergerak*. Sementara itu di Padangsidempuan, Parada Harahap membuat harian *Benih Merdeka* dan *Sinar Merdeka* pada tahun 1918 dan 1922. Dan, Bung Karno pun tidak ketinggalan pula telah memimpin harian *Suara Rakyat Indonesia*, *Sinar Hindia*, *Sinar Indonesia* dan *Sinar Merdeka* di tahun 1926. Penerbitan pergerakan dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun ada juga yang terang-terangan.

Karena sudah meresahkan pemerintah waktu itu, muncul peraturan kebebasan menyuarakan pesan yang tertuang dalam undang-undang; *Pers Ordonantie* tahun 1931 tentang pembredelan surat kabar. Jauh sebelumnya, juga sudah ada *Drukpers Reglement* tahun 1856 tentang aturan sensor preventif. Sikap perlawanan dan kritis terhadap pemerintah Hindia Belanda melalui surat kabar tersebut membuat tokoh pergerakan, Soekarno, Hatta dan Syahrir dibuang ke Boven Digul. Dua penguasa tertinggi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936) dan

¹² Raden Mas Djokomono Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), lebih dikenal Tirto Adhi Soerjo, (1880-1918), sering disingkat menjadi T.A.S. Dikukuhkan sebagai Bapak Pers Nasional, tahun 1973. Pada tanggal 3 November 2006, ia mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres RI No. 85/TK/2006. Kiprahnya dalam persuratkabaran sangat besar di tanah air. Menjadikan surat kabar sebagai alat perjuangan kemerdekaan. Selain surat kabar juga mendirikan Serikat Dagang Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam. Surat kabar yang pernah diasuh Tirto, *Soenda Berita* (1903-1905), *Medan Prijaji* (1907) dan *Putri Hindia* (1908) dan *Al-Islam* (1911). Kiprah propaganda melalui media membuatnya dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda, ke Pulau Bacan, dekat Halmahera (Provinsi Maluku Utara).

Gubernur Jenderal Tjarda van Star sangat terganggu dengan artikel-artikel *gezagsvijandige* atau tulisan-tulisan yang memusuhi pemerintah.

Serikat Islam di bawah kepemimpinan Tirto Adhi Soerjo terus mengembang sayap organisasi melalui surat kabar. Selain menerbitkan *Oetoesan Hindia*, tiga tahun sesudahnya, tahun 1916 menerbitkan majalah *al-Islam*. Beberapa cabang SI juga menerbitkan majalah, seperti cabang Bandung menerbitkan, *Pantjaran Warta*, sedangkan cabang Semarang menerbitkan *Sinar Djawa*. *Al-Islam* sangat jelas memiliki kecenderungan politik yang frontal sekaligus radikal. Menggelorakan agama dan politik. Lebih maju menggulirkan hak untuk memerintah di tanah sendiri. *Al-Islam* menggunakan istilah *Bangsa Islam tanah Hindia*.

Selain cabang-cabang Serikat Islam menerbitkan media cetak, tokoh-tokohnya juga menerbitkan media cetak sendiri. H. Agus Salim bersama Abdul Muis, menerbitkan harian *Neratja*. Harian yang berorientasi politik. Agus Salim nantinya akan dikenal juga melalui harian *Hindia Baru*, *Bendera Islam*, *Fajar Asia*. *Hindia Baru* (1925-1930), Agus Salim berduet dengan Tjokroaminoto. Sedangkan *Fajar Asia* bersama Kartosuwirjo.¹³ *Fajar Asia* terkenal kritis, gigih membuka bobrok pemerintah kolonial. Salah satunya praktek kuli kontrak di perkebunan Sumatera (*poenale sanctie*), kerja rodi (*heerendienst*) dan eksploitasi tanah sewa kontrak (*erfpacht*).¹⁴

Setiap daerah tokoh-tokoh dan organisasi Islam juga memiliki gairah untuk menerbitkan media cetak, seperti di Padang, Jogjakarta, Makassar, Semarang, Surabaya, dll. Di Jogjakarta, tempat lahirnya Muhammadiyah, pada tahun 1915, terbit *Medan Muslimin*, yang diprakarsai Fachrudin.¹⁵ Tokoh Muhammadiyah, murid KH. Ahmad

¹³Soekarmadji Maridjan Kartosuwirjo, lahir di Cepu (1905–1962). Seorang tokoh Islam Indonesia memilih jalan pemberontakan yang disebut, Darul Islam melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 hingga tahun 1962, dengan tujuan mengamalkan Al-Qur'an dan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Ia juga pernah aktif di organisasi besar Serikat Islam dan menjadi *Pemimpin Redaksi Koran Harian Fajdar Asia*. Kariernya kemudian melejit saat ia menjadi sekretaris jenderal Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). PSII merupakan kelanjutan dari Sarekat Islam. Kartosuwirjo kemudian bercita-cita untuk mendirikan negara Islam (Daulah Islamiyah) yang diproklamirkan pada 7 Agustus 1949, setelah gagal memasukkan tujuh kata dari Piagam Jakarta ke dalam Pancasila. Tragis, hidupnya berakhir di hadapan regu tembak negara sendiri. Satu peluru menembus dadanya, di Pulau Seribu, 5 september 1962.

¹⁴Lihat dalam Hendra Naldi, *Booming Surat Kabar...* dan Mas'oeed Abidin, *Ensiklopedia Minangkabau...*

¹⁵Pemikiran Fachrudin di berbagai membahas mulai dari agama Islam, Kristen, hingga kepeduliannya terhadap nasib rakyat yang begitu menderita. Ia misalnya pernah

Dahlan. Sebelum menerbitkan *Medan Muslimin*, Fachruddin menjadi koresponden *Doenia Bergerak*. Fachroddin juga tercatat pernah menjadi menjadi pemimpin redaksi (*hoofdredacteur*), *Srie Diponegoro* (1918), *Soewara Moehammadijah*, dan *Bintang Islam*.¹⁶ *Bintang Islam* sudah mulai dikelola secara profesional. Majalah Dwi Mingguan yang pernah mencapai tiras 1500 eksemplar yang menjangkau Temasek, Perak dan Johor. Bung Hatta pernah menjadi koresponden *Bintang Islam* ketika masih kuliah di Amsterdam.¹⁷

Selain Muhammadiyah, ada organisasi Persatuan Islam (Persis), juga menerbitkan majalah *Pembela Islam*, pada tahun 1929. Tokohnya, A. Hassan, Fachruddin al-Kahiri dan M. Natsir. *Pembela Islam* selalu mengambil posisi frontal dengan media sekuler. Perdebatan sengit Soekarno dengan M. Natsir terjadi berawal di sini. Terutama tema negara Islam dan sekularisme. Selain perdebatan terbuka melalui media dengan tokoh sekuler, juga dengan ummat Islam. Natsir berdebat langsung dengan Rahmat Ali dari Ahmadiyah Qadian, pada tahun 1933. Natsir juga menyerang misionaris yang telah melakukan pelecehan terhadap Islam. Tulisannya sangat fenomenal dalam *Pembela Islam* berjudul *Zending Contra Islam* (1931).¹⁸

Organisasi Nahdatul Ulama, menerbitkan *Suara NU*, *Berita NU*, *Soeloeh NU*. Langsung dipimpin KH. A. Wahid Hasyim, didampingi KH. Mahfudz Shiddiq. Majalah-majalah NU banyak membicarakan persoalan pesantren dan madrasah.

Media cetak dari cendekiawan Islam menghiasi pergerakan Indonesia merdeka juga terjadi di Kalimantan, terbit *Persatuan* (Samarinda), *Pelita Islam* (Banjarmasin). Di Bangkalan Madura, terbit *al-Islah*, di Ambon, terbit *Suisma*. Sedangkan di Medan, terbit *Suluh Islam*, *Medan Islam*, *al-Hidayah*, *Menara Putri* dan *Panji Islam*. Tokoh-tokoh yang

menulis tentang 'Christen dan Moehammadijah' dan 'Islam Njawa Kemadjoean' (di Soewara Moehammadijah), *Verslag saja selama bepergian ke Mekkah* (di Soewara Moehammadijah & *Islam Bergerak*). Penyebabnya karena kala itu Ia menulis nasib rakyat yang menderita, *kebon tebu jang ditanam di atas tanah kita dengan djalan jang koerang menjenangkan, sehingga menjebakkan kelaparannya anak-anak boemi*". Tulisan ini mengantarkannya meringkuk di balik terali besi oleh pemerintah kolonial, lebih lengkap dalam Mu'arif, *Benteng Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010).

¹⁶Lihat Hendra Naldi, *Booming Surat Kabar...*

¹⁷Mafri Amir, *Historiografi Pers....* Lihat juga Mas'ood Abidin, *Ensiklopedia Minangkabau...*

¹⁸Howard M Federspiel, *The Persatuan Islam (Islamic Union)*, (Tesis Phd. Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1966).

terekam dalam sejarah, KH. Abdul Madjid Abdullah dan Rangkayo Rasuna Said. Majalah yang paling terkenal di Medan, *Pedoman Masyarakat* (1935)¹⁹, identik dengan nama Buya Hamka dan Yunan Nasution. Keduanya kelak menjadi tokoh Masyumi.

Pedoman Masyarakat sudah mulai memberi ruang kepada penulis selain redaksi, dari berbagai kalangan. Soekarno pernah menulis di sini, apalagi tokoh-tokoh Islam, seperti H. Agus Salim, dan M. Natsir, KH Mas Mansyur, hingga tokoh perempuan seperti Rangkayo Rasuna Said. *Pedoman Masyarakat* beserta banyak media cetak lainnya dibreidel pada masa Jepang.

Sementara itu di Padang, ditulis Hendra Naldi (2008) dalam *Booming Surat Kabar di Sumatra's Westkust*, di masa Datuk Soetan Maharadja yang lebih dikenal dengan sebutan Datuk Bangkit menguasai media massa, ia membela kaum adat. Datuk Bangkit memimpin *Pelita Ketjil*, 1882. *Pelita Ketjil* membela kaum adat. Datuk Bangkit juga menulis di *Pemandangan Islam* dan *Djago-Djago*, *Warta Berita* dan *Oetoesan Melajoe*. Datuk, mengarahkan penanya kepada ulama Syekh Achmad Chatib, pemilik *Djago Djago* dan *Pemandangan Islam*.²⁰

Perdebatan sengit adat dan agama di surat kabar membuat gairah membaca dan haus ilmu di kalangan masyarakat sangat meningkat. Saling serang di surat kabar sudah menjadi biasa. Perdebatan agama dan adat tersebut menyangkut *Matriarkat* yang dipandang tak sesuai dengan ajaran Islam. *Harta pusaka tinggi* yang tak bisa diperjualbelikan dan diatur menurut garis ibu, yang dikuasai kemenakan harus dikembalikan kepada anak mamaknya. Jika tidak, sama halnya dengan merampas harta anak yatim. Pada 1900, di Padang terbit surat kabar *Padanger*, gabungan *Sumatra Courant* dan *Nieuw Padangsche de Padanger Handelsblad*. Setahun sesudahnya, kaum muda, para guru, dan pegawai bumiputra berpendidikan Barat melahirkan sebuah jurnal bernama *Insoelinde*. Mereka, golongan ini, yakin kemajuan harus dicapai melalui pendidikan modern. Mereka kurang

¹⁹Motto *Pedoman Masyarakat*, *Memajukan Pengetahuan dan Peradaban Berdasarkan Islam*. Kupasan majalah meliputi, pengetahuan umum, agama, sejarah, alam perempuan, dunia islam serta cermin hidup. Di ruang inilah lahir karya-karya besar Buya Hamka seperti, *Merantau ke Deli*, *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*, *Tasawuf Modern* dan lain-lain. Sementara Yunan Nasution memegang peran penting sebagai penulis rubrik editorial, *Syma Nare*.

²⁰Khairul Jasmi, *Surat Kabar di Ranahminang, Konfigurasi yang Menakjubkan*, (Jakarta: Majalah Pantau, 2002).

suka pendidikan sekolah agama. Menurut Taufik Abdullah dalam bukunya, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, para pengasuh *Insoelinde* tergila-gila pada prestasi Jepang. Kata kuncinya: kaum muda, sekolah, dan politik. Jurnal ini memiliki koresponden dari seluruh Nusantara. Kebanyakan memuat artikel yang mendesak kemerdekaan Indonesia. *Insoelinde* juga membedah persoalan harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah, sebuah perdebatan yang hampir satu abad kemudian tetap menarik untuk dilakukan.

Berbeda dengan *Insoelinde*, surat kabar *Wasir Hindia* serta *Bintang Sumatera* yang terbit pada 1903 memuat banyak artikel tentang kemajuan Asia terutama Jepang. Pada 1905 terbit pula *Sinar Sumatera*, disusul *Warta Hindia* pada 1908.²¹

Oetoesan Melajoe muncul pada 1910, dan pada tahun berikutnya, *Soenting Melajoe*. *Oetoesan Melajoe* berusaha membangun rasa bangga masyarakat Minangkabau atas keminangkabauan mereka. Hal ini tercermin dalam moto *Oetoesan Melajoe: Jang Poenja dan Jang Mentjitik Snelpersdrukkerij Orang Alam Minangkabau*. Kedekatan hati Datuk Bangkit pada Minangkabau dan Melayu yang terpantul dalam tulisan-tulisannya, menjadi alasan filolog naskah melayu, Ph. S. Van Ronkel, menggelarnya *Bapak Jurnalis Melayu*. Soetan Maharadja (Datuk Bangkit) juga dinilai sebagai *Bapak Pers Sumatra Barat* atau istilah B.J.O. Schrieke, *Bapak dari wartawan Melajoe*.

Datuk Bangkit pernah juga terlibat polemik panjang dengan Sa'adah Alim, kelak jadi pemimpin redaksi *Suara Perempuan*, tentang pergaulan muda-mudi. Sa'adah ingin melihat dunia perempuan sebagai dunia yang tak dikekang terlalu erat. Sa'adah mengeluh betapa sulitnya seorang gadis hendak pacaran di Minangkabau. Datuk berpaham sebaliknya. Alasannya, pacaran itu tak sesuai dengan adat-istiadat. Wanita, apalagi seorang gadis, harus suci sehingga tak boleh bergaul terlalu bebas.

Isi tulisan Datuk Bangkit yang sangat memihak kaum adat membuat Abdullah Achmad, pendiri Yayasan Syarikat Oesaha Adabiah, terilhami menerbitkan surat kabar *Al Munir* pada 1911. Banyak orang pintar menulis di sana, antara lain Buya Rasul dan Syekh Muhammad Thaib dari

²¹Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, (New York: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971).

Sungayang. Dua ulama ini tak saja menulis bagaimana menjalankan agama Islam secara baik, tapi juga perkembangan pemikiran Islam di dunia.

Pada 1915, *Al Munir* pindah terbit di Padang Panjang dengan nama baru *Al Munirul Mannar*. Walau tirasnya kecil, jangkauannya luas sampai ke Malaysia. Ia jadi bacaan wajib kalangan ulama Minangkabau.

Tahun-tahun berikutnya, artikel yang muncul di surat kabar Padang lebih mengarah pada soal politik, khususnya semangat anti-Syarikat Islam. Malahan ada yang sampai pada kesimpulan bahwa Islam tak memerlukan Sarikat Islam lagi, padahal Sarikat Islam partai politik pertama di daerah ini dengan tokoh utamanya Abdul Muis, seorang intelektual muda. Banyak penghulu dan pegawai negeri yang menilai partai politik sebagai perusak otoritas pemerintah dan pendukung adat.

Setelah Padang, Padang Panjang mengambil peranan cukup penting dalam perdebatan agama, komunis, dan pembaharuan Islam. Hal serupa ternyata meluas ke kota-kota lain, seperti Padang Japang, Batusangkar, Sungayang, Maninjau, Parabek, dan Sulit Air. Perdebatan tersebut melibatkan hampir semua ulama terkenal, sesuatu yang tak pernah lagi terjadi di alam kemerdekaan, berpuluh-puluh tahun kemudian.

Empat surat kabar khusus perempuan juga meramaikan dunia persuratkabaran Sumatera ini, masing-masing *Soenting Melajoe* (1911) di Padang yang dipimpin Ratna Djuita, putri Soetan Maharadja yang dibantu Rohana Kudus²², *Soeara Perempuan* (1919) yang dipimpin Sa'adah Alim, *Soeara SKIS* (Serikat Kaum Ibu Sumatra, 1938) di Padang Panjang yang dipimpin Encik Djusa'ir, serta *Soera Poetri* di Bukittinggi yang dipimpin Djanewar Djamil dan Sjamsidar Jahja.

Sebanyak 10 surat kabar di Padang memakai nama media yang memikat dan menggelorakan roh perjuangan, seperti *Pelita Ketjil*, *Djago-Djago*, *Boeka Mata*, *Soeloeh Melaju*, *Bintang Tionghoa*, dan *Perubahan*. Dari 107 surat kabar dan majalah yang diterbitkan kaum terpelajar Indonesia—seperti dicatat B. Schrieke, penasihat pemerintah Belanda urusan bumiputera—surat kabar di Padang dan Semaranglah yang memakai nama-nama bernuansa perjuangan semacam itu.

Yang menarik, baik *Pemandangan Islam* maupun *Djago Djago* membawa bendera Islam juga panji komunisme. Di Sumatera Barat saja, selain di Padang Panjang, surat kabar sehaluan terdapat di Padang (*Petir*,

²²Danil M. Chaniago, *Perempuan Bergerak. Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921*, *Jurnal Kafaah, Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. IV No.1 Tahun 2014.

Buka Mata, dan *Torpedo*), Bukittinggi (*Doenia Achirat*), dan Solok (*Sasaran Ra'jat*). Surakarta yang terbanyak, memiliki enam surat kabar, disusul Semarang dan Bandung, masing-masing empat surat kabar. Namun demikian, yang paling dominan tetaplah surat kabar berhaluan Islam.

Hendra Naldi, Nasrul Azwar, Khairul Jasmi, Mafri Amir dan Mas'oeed Abidin sepakat menyatakan surat kabar di Ranahminang telah menggelorakan semangat perjuangan kemerdekaan, ajaran Islam, serta tempat surat kabar Islam paling tua di nusantara. Secara kultural, tak heran, Minangkabau disebut Jane Drakkard, sebagai suku yang dibangun dengan kata-kata. "*A Kingdom of Word*," kata Jane.²³

Ketika Jepang berkuasa di Sumatera Barat, praktis semua penerbitan gulung tikar. Sepanjang 3,5 tahun itu, hanya ada tiga surat kabar yang sepenuhnya dikendalikan Jepang. *Padang Nippo*, *Sumatra Simbun*, dan *Domei*. Begitu Indonesia merdeka, suasana pun berubah. Para wartawan yang dulu memiliki surat kabar berlomba-lomba menghidupkan kembali surat kabarnya yang dulu mati suri karena ditekan oleh pemerintah Jepang.

2. Media Cetak di Masa Kemerdekaan

Sumbangan surat kabar sebelum kemerdekaan terasa bernasnya. Mereka membangun masyarakat yang berpikir, menghargai pendapat, memberi ruang bagi pengembangan ide-ide. Tapi, pada periode berikutnya, mungkin karena medan perjuangan yang juga berbeda, kehadiran surat kabar dan majalah lebih berbicara pada rencana setelah kemerdekaan. Lambat-laun mereka masuk dalam kusut-masainya persoalan bangsa.

Di Sumatera Barat, masyarakat sangat haus akan berita, terutama mengenai perjuangan dan pergolakan yang berlangsung. Rasa haus itu terpuaskan oleh Bustanuddin yang menghadirkan majalah bulanan *Berdjuang* yang terbit di Padangpanjang pada September 1945. Di kota yang sama, tiga bulan kemudian, muncul harian *Demokrasi* yang diterbitkan Yusdja dengan pemimpin redaksi M. Joesoef.

Pada 1946, Hamka dan Haskim kembali menghadirkan sebuah majalah di Padang Panjang dengan nama *Menara*. Majalah ini membawa suara golongan Muhammadiyah. Setelah di kota hujan itu, pada September

²³Pernyataan Jane Drakkard ini tidak untuk konteks surat kabar, tetapi dalam hal kebudayaan pada abad 17 dan 18 yang membuat Minangkabau tercatat dalam sejarah. Baca Jane Drakkard, *A Kingdom of Word: Language and Power in Sumatra*, (New York: Oxford University Press, 1999).

1945 di Padang hadir pula harian *Utusan Sumatera* yang diterbitkan Bariun A.S. bersama Mulkan, Muchtar Mahyuddin, Marah Alif dan, sejumlah nama lain. Masih di Padang, pada bulan yang sama lahir *Suara Sumatera* yang diterbitkan Lie Un Sam. Surat kabar ini dipimpin S. Alaudin. Usianya singkat. Tapi, pemiliknya menerbitkan surat kabar lain, *Harian Penerangan*.

Salah seorang tokoh dan pengusaha pers, Adinegoro²⁴ tak mau ketinggalan. Ia menerbitkan surat kabar yang *Kedaulatan Rakyat* pada Oktober 1945 di Bukittinggi. Adinegoro berhasil memperjuangkan alat-alat percetakan, kertas, dan tinta di Kayu Ramang, lalu mempercayakan Anwar Luthan menjadi pemimpin redaksi koran ini. *Kedaulatan Rakyat* satu-satunya surat kabar di Sumatera Barat, juga dikenal dengan Sumatera Tengah, yang bertiras paling tinggi masa itu. Oplahnya mencapai 14 ribu eksemplar. Dengan tirus sebanyak itu, dalam keadaan sulit karena sekutu setiap saat mengancam, *Kedaulatan Rakyat* terus menggelorakan semangat rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan.

Ketika Adinegoro pindah ke Jakarta, *Kedaulatan Rakyat* berubah nama menjadi *Daulat Rakyat*, lalu berganti lagi dengan *Utusan Rakyat*. Barangkali surat kabar yang sering berganti nama memang tak berumur panjang. Tak berapa lama, bahan-bahan percetakan sulit didapat. Situasi bertambah buruk saat pemerintah menyita percetakan surat kabar ini. Riwayat *Kedaulatan Rakyat*, sebuah surat kabar terbesar yang pernah ada di Sumatra Barat pun tamat. Namun, sejarah tetap menuliskannya.

Sementara itu, Kasoema yang menjadi wartawan *Demokrasi* di Padang Panjang pada 1948, menerbitkan surat kabar *Haluan di Bukittinggi*, kemudian kantor harian ini pindah ke Padang. Sebelum *Haluan* milik Kasoema, pada 1926 pernah terbit surat kabar bernama sama di Padang. *Haluan* sama radikalnya dengan surat kabar *Boeka Mata* yang dipimpin Muhammad Sahak. Motonya saja berbunyi, "*Haluan menerangkan macam-macam kesesatan dan kegelapan yang telah ditaburkan oleh beberapa pembohong dan pendusta,*" tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud "pembohong dan pendusta" itu. Sejumlah surat kabar lainnya juga memperkaya konfigurasi jagad pers Minang, seperti *Suara Merdeka*, *Pelopop*, *Nyata*, dan tabloid *Kemudi*.

Seperti Khairul Jasmi, Nasrul Azwar juga menuliskan Mahyoeddin Datuk Soetan Mahradja sebagai tokoh pers paling menonjol. Beberapa

²⁴Adinegoro Award, penghargaan tertinggi bagi karya jurnalistik untuk wartawan Indonesia yang diberikan Dewan Pers setiap tahun, mengambil nama tokoh ini.

penerbitan pers komunitas saat antara lain, *Barito Koto Gadang* (Fort de Kock, 1929-32), *Boedi Tjaniago* (Fort de Kock, Drukkery Agam, 1922), *Soeara Kota Gedang* (Fort de Kock, Vereeniging Studiefonds Kota Gedang, 1916-17), *Al Achbar* (Padang, 1913-14, dalam bahasa Arab), *Al I'laam* (Koto Toeo, Ampat Angkat, 1922-23), *Moeslim India* (Padang, Moeslim India, 1932), *Algemeenteen Advertieblad* (Padang, Padangsche Snelpres, 1921, dalam bahasa Belanda), *Bintang Tjong Hoa* (Padang, Tjong Hoa Ien Soe Kiok, 1910-15).²⁵

Memasuki masa pemerintahan Jepang kehidupan surat kabar lebih dipersempit, selain UU Belanda UU No. 16 yang pasal-pasalanya sangat menakutkan mengenai izin terbit, juga diberlakukan penasehat (*Shidooin*) dari pemerintah pada surat kabar. Lebih dari itu, surat kabar-surat kabar yang ada di Indonesia diambil alih pelan-pelan oleh pemerintah. Beberapa surat kabar disatukan dengan alasan menghemat alat-alat tenaga.

Tujuan sebenarnya adalah agar pemerintah Jepang dapat memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor berita *Antara* pun diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita *Yashima* dan selanjutnya berada di bawah pusat pemberitaan Jepang, yakni *Domei*. Wartawan-wartawan Indonesia pada saat itu hanya bekerja sebagai pegawai, sedangkan yang diberi pengaruh serta kedudukan adalah wartawan yang sengaja didatangkan dari Jepang. Pada masa Jepang surat kabar hanya bersifat propaganda dan memuji-muji pemerintah dan tentara Jepang.²⁶

Salah satu surat kabar yang terbit pada masa ini adalah *Tjahaja*. Surat kabar ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan penerbit berada di kota Bandung. Beritanya banyak tentang persoalan di Jepang. Para pemimpinnya di antaranya adalah Oto Iskandar Dinata, R. Bratanata, dan Mohamad Kurdi. Pada tampilan tampak bahwa surat kabar tersebut bertuliskan tanggal 24 Shichigatsu 2604, yang pada penanggalan masehi sama dengan tanggal 24 Juli 1944.

Pada masa kemerdekaan, peralatan percetakan biasanya menjadi incaran untuk dikuasai segera seperti sarana vital yang harus direbut, termasuk stasiun radio. Ketika merdeka, posisi surat kabar mulai menguat, yang ditandai oleh mulai beredarnya koran *Soeara Merdeka* (Bandung),

²⁵Nasrul Azwar, *Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu*, Opini Harian Pagi Padang Ekspres, 2007).

²⁶Taufik Abdullah, *Schools and Politics...*

Berita Indonesia (Jakarta), *Merdeka*, *Independent*, *Indonesian News Bulletin*, *Warta Indonesia*, dan *The Voice of Free In*.

3. Media Cetak di Masa Orde Lama

Ketika pemerintah Jepang menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda pencitraan pemerintah, Indonesiapun melakukan hal yang sama untuk melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Edi Soeradi melalui *Berita Indonesia* melakukan propaganda agar rakyat berdatangan pada Rapat Raksasa Ikada pada tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato Bung Karno.

Akibatnya *Berita Indonesia* berulang kali mengalami pembredelan dimana selama pembredelan tersebut para pegawai kemudian ditampung oleh surat kabar *Merdeka* yang didirikan oleh B.M. Diah.

Kritika terhadap pemerintah Jepang bukannya berhenti, surat kabar perjuangan lainnya adalah *Harian Rakyat* dengan pemimpin redaksi Samsudin Sutan Makmur dan Rinto Alwi. Surat kabar lainnya yang terbit pada masa ini adalah *Soeara Indonesia*, *Pedoman Harian* yang berubah menjadi *Soeara Merdeka* (Bandung), *Kedaulatan Rakyat* (Bukittinggi), *Demokrasi* (Padang) dan *Oetoesan Soematra* (Padang).

Pada masa pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal di bawah komando Soekarno, banyak didirikan partai politik dalam rangka memperkuat sistem pemerintah parlementer. Surat kabar menjadi alat propaganda dari partai politik. Partai politik memiliki surat kabar sebagai corong partainya. Pada masa itu, media cetak dikenal sebagai media partisipan.²⁷ Akibatnya pergolakan politik tidak terelakkan dan begitu rawan konflik. Inilah era demokrasi liberal yang membuat Soekarno ingin mengubahnya menjadi demokrasi terpimpin. Februari 1957 Soekarno kembali mengemukakan konsep Demokrasi Terpimpin yang diinginkannya. Tetapi berbagai pemberontakan di banyak daerah di Indonesia mulai terjadi karena mengoreksi Soekarno yang selalu mengambil kebijakan pembangunan yang terpusat Jawa.

Pemberontakan di daerah membuat Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat Perang pada 14 Maret 1957. Selama dua tahun Indonesia terkungkung dalam perseteruan antara parlemen melawan rezim

²⁷*Harian Rakyat*, organ Partai Komunis Indonesia (PKI) dengan oplah 55.000/hari. *Pedoman*, organ Partai Sosialis Indonesia (PSI) dengan oplah 48.000/hari. *Suluh Indonesia*, organ Partai Nasionalis Indonesia (PNI) beroplah 40.000/hari. *Abadi*, organ Masyumi, dengan oplah 34.000/hari.

Soekarno yang berkolaborasi dengan militer. Namun, tak berselang lama, Soekarno menerbitkan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 45, disusul dengan pelarangan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi, karena keterlibatan kedua partai tersebut dalam pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tahun 1958 di Sumatera.²⁸

Setelah dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh presiden Soekarno, terdapat larangan terhadap kegiatan politik termasuk pers. Tindakan tekanan terhadap surat kabar terus berlangsung, yaitu pembredelan terhadap kantor berita PIA dan surat kabar *Republik*, *Pedoman*, *Berita Indonesia*, dan *Sin Po*.

Menteri Muda Penerangan Maladi dalam sambutannya pada HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke-14, menyatakan, “hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana dijamin UUD 1945 harus ada batasnya: keamanan negara, kepentingan bangsa, moral dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Maladi menegaskan, langkah-langkah tegas akan dilakukan terhadap surat kabar, majalah-majalah, dan kantor-kantor berita yang tidak menaati peraturan yang diperlukan dalam usaha menerbitkan pers nasional. Tahun 1960 penguasa mulai mengenakan sanksi-sanksi perizinan terhadap pers. Tahun 1964 kondisi kebebasan pers makin buruk. Kementerian Penerangan dan badan-badannya mengontrol semua kegiatan pers. Perubahan ada hampir tidak lebih sekedar perubahan sumber wewenang, karena sensor tetap ketat dan dilakukan secara sepihak.

Di tengah dinamika politik Orde Lama, Buya Hamka bersama, Faqih Usman, Joesof Abdoellah Poear, dan HM Joesoef Ahmad menerbitkan *Panji Masyarakat* (*Panjimas*). Semula terbit sebagai dwimingguan, kemudian tiga kali sebulan. Hampir seluruh isinya berupa artikel tentang agama. Tetapi setelah melewati umur seperempat abad, isi dan penampilan tata wajahnya (*layout*) lebih mengarah ke majalah berita. Sekitar separo isinya berupa berita aktual dan laporan, dan selebihnya berupa opini. *Panjimas* juga pernah merasakan pahitnya pembredelan oleh rezim orde lama tetapi di orde baru, *Panjimas* terbit kembali.

²⁸Deliar Noer, *Gerakan Modern....* Lihat juga Sastri Sunarti, *Kajian Lintas Media, Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Surat Kabar Terbitan Awal di Minangkabau (1859-1940-an)*, (Jakarta : KPG 2013).

4. Media Cetak di Masa Orde Baru

Peristiwa G 30 S/PKI bisa dijadikan tanda berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno. Kemudian bangsa Indonesia memasuki alam Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada awalnya, Orde Baru menjanjikan keterbukaan serta kebebasan dalam berpendapat. Janji itu membuat stabilitas politik terjadi, sungguhpun begitu, militerisme sebenarnya ikut andil untuk stabilitas politik tersebut.

Pemerintah Orde Baru sangat menekankan pentingnya pemahaman tentang pers Pancasila. Dalam rumusan Sidang Pleno XXV Dewan Pers (Desember 1984), Pers Pancasila adalah Pers Indonesia dalam arti pers yang orientasi sikap dan tingkah lakunya didasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD'45. Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang benar dan objektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif.

“Bulan madu” antara pers dan pemerintah ketika dipermanis dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pers (UUPP) No. II tahun 1966, yang dijamin tidak ada sensor dan pembredelan, serta penegasan setiap warga negara mempunyai hak untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif dan tidak diperlukan surat ijin terbit. Kemesraan ini hanya berlangsung kurang lebih delapan tahun karena sejak terjadinya “Peristiwa Malari” (Peristiwa Lima Belas Januari 1974), kebebasan pers kembali seperti zaman Orde Lama. Dikekang oleh pemerintah Orde Baru.

Pada periode ini, surat kabar yang dipaksa untuk berafiliasi, seperti *Kedaulatan Rakyat* yang pada zaman orde lama harus berganti menjadi *Dwikora*. Hal ini juga terjadi pada *Pikiran Rakyat* di Bandung. Bahkan pers kampuspun mulai aktif kembali. Namun di balik itu semua, pengawasan dan pengeangan pada pers terutama dalam hal konten tetap diberlakukan.

Pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah harus pencabutan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP), seperti yang terjadi pada *Sinar Harapan*, tabloid *Monitor* dan *Detik* serta majalah *TEMPO* dan *Editor*. Pers lagi-lagi dibayangi dalam kekuasaan pemerintah yang cenderung memborgol kebebasan pers dalam membuat berita serta

menghilangkan fungsi pers sebagai kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Pembredalanpun marak pada periode ini.²⁹

Alasan Orde Baru, hanya dengan stabilitas politik memungkinkan pembangunan berjalan. Salah satu jalan menciptakan stabilitas politik itu melalui pembatasan kebebasan berpendapat. Dunia pers di masa Orde Baru dikekang melalui peraturan-peraturan yang kembali seperti pada masa penjajahan. Melalui Menteri Penerangan, penerbitan dipantau dari dekat. Tindakan refresif dari militer juga sering terjadi ke ruang-ruang redaksi sebelum penerbitan dilakukan.

Pers dipaksa menjadi alat penerangan pembangunan dan harus patuh terhadap Pancasila. Pers harus pandai menjauhkan “mata kekuasaan” yang bisa menuduh subversif, yang mengakibatkan penjara bagi para awak redaksi dan breidel bagi penerbitan. Karena itu, pers sering menyebut diri mereka sebagai pers Pancasila. Yang bercirikan, bebas dan bertanggungjawab. Sebenarnya, pada masa Orde Baru, pers berkembang baik sebagai lembaga industri.³⁰

Demokrasi Pancasila disorot sebagai demokrasi yang represif dengan kekuatan militer di bawah komando Soeharto, ketika tanggal 21 Juni 1994, Majalah *TEMPO*, *Detik* dan *Editor*, dicabut izin penerbitannya. Tiga majalah ini dipandang Menteri Penerangan R.I., Harmoko³¹, dianggap telah diluar batas memuat hasil investigas berbagai penyelewengan penyelenggaraan negara. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sangat marak, terutama kroni-kroni kekuasaan Cendana. *TEMPO* nantinya terbit kembali setelah reformasi.

²⁹Lahirnya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia 1994, sebagai perlawanan komunitas pers Indonesia terhadap kesewenang-wenangan rezim Orde Baru. Pembredelan *Detik*, *Editor* dan *TEMPO*, 21 Juni 1994 dinilai sebagai tindakan represif. Inilah yang memicu aksi solidaritas sekaligus perlawanan dari banyak kalangan secara merata di sejumlah kota. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menjadi antitesa dari kehadiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang diduga tidak mengambil sikap tegas terhadap pembredelan terhadap media cetak. Sekitar 100 orang yang terdiri dari jurnalis dan kolumnis berkumpul di Sirnagalih, Bogor, 7 Agustus 1994. Pada hari itulah mereka menandatangani Deklarasi Sirnagalih, serta mengumumkan berdirinya AJI. *Klik di <https://aji.or.id/read/sejarah.html>*, dikunjungi pada 11 April 2016, pukul 11.07 WIB.

³⁰Sudirman Teba, *Jurnalistik Baru*, (Jakarta: Kalam Indonesia, 2005).

³¹Seorang wartawan yang memilih jalur politik praktis, bergabung dengan Golkar. Orde Baru menjalankan roda kekuasaan melalu tiga jalur utama, Golkar, Militer, Pemerintahan.

Salah satu media cetak yang berhaluan Islam yang patut dicatat, adalah *Panji Masyarakat (Panjimas)*. *Panjimas* sempat dibredel oleh Soekarno, terbit kembali 5 Oktober 1966 ketika Soeharto mulai berkuasa. Majalah ini beredar tidak hanya di Indonesia, juga di Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia. *Panji Masyarakat* tempat cendekiawan muda pada masa itu mengasah intelektual dalam bidang jurnalistik. Tercatat, cendekiawan muda pada masanya, seperti Azyumardi Azra, Komaruddin Hidayat, Rusydi Hamka, pernah aktif menjadi jurnalis di majalah ini.³²

Pada tujuh tahun terakhir sebelum rezim Orde Baru runtuh, sebenarnya kekuatan Islam sedang mendapat tempat. Atau paling tidak, dapat dikatakan sebagai bagian yang telah diperhatikan secara khusus oleh rezim Orde Baru. Wakil Presiden Baharuddin Jusuf (BJ). Habibie termasuk yang memainkan peran kekuatan tersebut. Sebab Habibie sangat dipercaya oleh Soeharto. Ia diberikan kebebasan melakukan kegiatan politik sejak dipanggil pulang ke Indonesia dari Jerman. BJ. Habibie menggagas lahirnya organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),³³ dari ICMI lahir gagasan hingga terbitnya *Harian Republika*. ICMI yang sedang mendapat tempat di pemerintahan melalui BJ. Habibie, mendukung usulan penerbitan surat kabar yang bernuansa Islam. Salah seorang tokoh yang mengusulkan tersebut, Zaim Uchrowi, mantan wartawan *TEMPO*. Surat Izin Usaha Perusahaan Penerbitan (SIUPP) yang memang sulit didapat, melalui ICMI, membuat *Harian Republika* lahir mulus dan terbit perdana pada 4 Januari 1993. Soeharto juga mendukung pengembangan surat kabar ini, pada konteks informasi yang bersifat *pluralism*.

Kelahiran ICMI bukannya sebuah kebetulan sejarah belaka, tetapi erat kaitannya dengan perkembangan global dan regional di luar dan di dalam negeri. Menjelang akhir dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, dunia ditandai dengan berakhirnya perang dingin dan konflik ideologi.

³²<http://www.panjimas.com/news/2014/09/19/jimly-ashiddiqie-banyak-intelektual-muslim-lahir-dari-panji-masyarakat-pimpinan-rusydi-hamka/> diakses, 10 April 2016, pukul 14.28 WIB.

³³ICMI adalah sebuah organisasi cendekiawan muslim di Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim di Kota Malang tanggal 6-8 Desember 1990. Di pertemuan itu juga dipilih Baharuddin Jusuf Habibie sebagai ketua ICMI yang pertama. Dan saat ini Ketua Umum ICMI periode 2015-2020 Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H terpilih dalam Muktamar VI dan Milad ke-25 ICMI di Hotel Lombok Raya, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Minggu (13/12/2015).

Seiring dengan itu semangat kebangkitan Islam di belahan dunia timur ditandai dengan tampilnya Islam sebagai ideologi peradaban dunia dan kekuatan alternatif bagi perkembangan peradaban dunia. Bagi Barat, kebangkitan Islam ini menjadi masalah yang serius karena itu berarti hegemoni mereka terancam. Apa yang diproyeksikan sebagai konflik antar peradaban lahir dari perasaan Barat yang subjektif terhadap Islam sebagai kekuatan peradaban dunia yang sedang bangkit kembali sehingga mengancam dominasi peradaban Barat.

Republika diharapkan dapat menjadi corong pemikiran kalangan cendekiawan muslim, sebagai upaya panjang kalangan umat Islam, menembus pembatasan ketat pemerintah untuk izin penerbitan saat itu. Koran ini terbit di bawah bendera perusahaan PT Abdi Bangsa. Setelah BJ Habibie tak lagi menjadi presiden dan seiring dengan surutnya kiprah politik ICMI selaku pemegang saham mayoritas PT Abdi Bangsa, pada akhir 2000, mayoritas saham koran ini dilepas ke kelompok Mahaka Media.

5. Media Cetak di Masa Era Reformasi

Runtuhnya rezim Soeharto, sebagai penanda lahirnya era reformasi³⁴ 1998. Kebebasan di Indonesia dalam era reformasi ditandai dengan lahirnya UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam Undang-Undang ini, dengan tegas dijamin adanya kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara (pasal 4). Izin terbit hanya pendaftaran perusahaan penerbitan di Dewan Pers, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kemenkumham. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 2.

Gegap gempita kebebasan pers itu disambut gembira oleh kalangan pers yang selama ini takut kena breidel. Ini ditandai dengan banyak penerbitan yang lahir pada paruh 1999-2002. Namun tidak semua bernasib baik. Pers lahir bak cendawan tumbuh di musim hujan, layu ketika musim panas tiba. Persoalan-persoalan pers muncul demikian banyak, baik intern maupun ekstern. Mulai dari upah layak, profesionalisme, juga penumpang gelap pers di era reformasi. Salah satu yang menyulitkan, kebebasan pers

³⁴Gerakan Reformasi yang dimotori aktivis '98, memiliki 10 agenda reformasi, di antaranya: otonomi daerah, hentikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kebebasan pers, kebebasan berpendapat, penegakan hukum. (Abdullah Khusairi, *Gerakan Reformasi Berhenti di Kaki Pelangi*, Harian Umum Independen SINGGALANG, Padang, Selasa 13 Mei 2014).

dibajak oleh pengusaha-pengusaha yang tergiur dengan belanja iklan. Pers Indonesia memasuki babak oligopoli, dikuasai beberapa orang pebisnis besar, yang menguasai, media cetak, radio, televisi hingga portal online. (*Lihat bahasan Media Massa Era Industri Informasi*)

Setelah berjalan kurang lebih 15 tahun kebebasan pers didapatkan, yang terjadi bukan pers yang sehat. Justru sebaliknya, pers Indonesia masuk jauh ke wilayah politik kepentingan kekuasaan dan politik ekonomi. Industri persi di kebiri pemilik modal dan politisi. Pers Indonesia mengalami kebebasan yang kebablasan.³⁵

C. Peta Media Cetak Cendekiawan Muslim

Penulis mencoba memetakan media cetak melalui tahun terbit secara kronologis bersamaan tempat dan tokoh di belakangnya penerbitan media cetak tersebut. Seperti terdapat dalam tabel berikut ini:

Peta Media Cetak Sejak Masa Kolonial Hingga Masa Kini

Tahun Terbit	Surat Kabar	Kota	Tokoh
1676	<i>Kort Bericht Eropa</i>	Jakarta	Pemerintah Belanda
1744	<i>Bataviase Nouvelles</i>	Jakarta	Pemerintah Belanda
1780	<i>Vendu Nieuws</i>	Jakarta	Pemerintah Belanda
1810	<i>Bataviasche Koloniale Courant</i>	Jakarta	Pemerintah Belanda
1828	<i>Javasche Courant</i>	Jakarta	Pemerintah Belanda
1835	<i>Het Bataviasche</i>	Jakarta	Pemerintah Belanda
	<i>Semarangsche Advertentieblad</i>	Semarang	Pemerintah Belanda
	<i>Semarangsche Courant</i>		

³⁵Ketika penulis masih aktif menjadi anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, persoalan kebebasan pers, kelayakan upah, profesionalisme, sering menjadi fokus kajian organisasi. Lihat Abdullah Khusairi, "Pers Bebas bukan Seks Bebas", *Harian Umum Independen SINGGALANG*, 7 Februari 2012.

	<i>Celebe Courant</i>	Ujung Pandang	
	<i>Makassaarch Handelsbland</i>	Makasar	Pemerintah Belanda
1885	<i>Bintang Barat Hindia-Nederland Dinihari Bintang Djohar Selompret Melayu Tjahaja Moelia Pemberitaan Bahroe Bromartani</i>	Surabaya Solo	
1859	<i>Bentara Melajoe Soematra Courant Padang Handeslsbland</i>	Padang	
1864	<i>Bintang Timoer</i>	Padang	
1900	<i>Padanger gabungan Sumatra Courant dan Nieuw Padangsch de Padanger Handelsblad.</i>	Padang	Pemerintah Belanda
1903-1905 1907 1908	<i>Soenda Berita Medan Prijaji Putri Hindia</i>	Jakarta	Tirto Adhi Soerjo HOS. Tjokroaminoto Serikat Islam
1910-1915	<i>Bintang Tionghoa</i>	Padang	
1911	<i>Al Munir</i>	Padang	Abdullah Ahmad
1913	<i>Al-Munir Al-Munir</i>	Padangpanjang	
	<i>Al-Islam</i>	Batavia	
	<i>Sinar Djawa</i>	Semarang	
	<i>Pantjaran Warta</i>	Bandung	SI
1913-1914	<i>Al Achbar</i>	Padang	
1915	<i>Medan Muslimin Guntur Bergerak Hindia Bergerak</i>	Jogyakarta Jogjakarta	Muhammadiyah Suwardi Suryaningrat alias Ki Hajar Dewantara
1918-1922	<i>Benih Merdeka Sinar Merdeka</i>	Medan	Parada Harahap

1921	<i>Algemeenteen Advertieblad</i>	Padang	Pemerintah Belanda
1922	<i>Boedi Tjaniago</i>	Bukittinggi	
1912-1921	<i>Soenting Melajoe</i>	Bukittinggi	Rohana Kudus
1922-1923	<i>Al T'laam</i>	Bukittinggi	
1926	<i>Suara Rakyat Indonesia Sinar Merdeka Sinar Hindia Sinar Indonesia</i>		Soekarno
1929	<i>Pembela Islam</i>	Jakarta	Persis
1929-1932	<i>Berito Koto Gadang</i>	Bukittinggi	
1926	<i>Haluan</i>	Bukittinggi	Kasoema
1932	<i>Moeslim India</i>	Padang	
1925-1930	<i>Pemandangan Islam</i>		H. Agus Salim
	<i>Suara NU</i>	Jakarta	NU
	<i>Berita NU</i>	Jogja	KH. A Wahid
	<i>Soeloeh NU</i>	Semarang	Hasyim
24 Juli 1944	<i>Tjahaja</i>	Bandung	
	<i>Soeara Merdeka</i>	Bandung	
	<i>Berita Indonesia Merdeka Independent Indonesian News Bulletin Warta Indonesia, dan The Voice of Free In Harian Rakyat</i>	Jakarta	Samsudin Sutan Makmur - Rinto Alwi
1945	<i>Berdjuang</i>	Padang Panjang	M. Joesoef
	<i>Kedaulatan Rakyat</i>	Bukittinggi	
	<i>Demokrasi</i>	Padang Panjang	
	<i>Utusan Sumatera</i>	Padang	Bariun AS
1946	<i>Majalah Menara</i>	Padangpanjang	Hamka
1948	<i>Haluan</i>	Padang	Kasoema
1959	<i>Panji Masyarakat Abadi Aman Makmur</i>	Jakarta	M. Natsir Masyumi
28 Juni 1965	<i>Harian Umum Kompas</i>	Jakarta	PT. Kompas Media Nusantara P.K. Ojong (1920-1980)

9 Januari 1970	<i>Media Indonesia</i>		Surya Paloh
6 Maret 1971	<i>Majalah Tempo</i>	Jakarta	PT. Grafiti Pers Goenawan Mohamad
1992	<i>Majalah Sabili</i>	Jakarta	PT. Bina Media Sabili Rahmat Ismail
1993	<i>Harian Republika</i>	Jakarta	Zaim Uchrowi

Penulis masih berusaha melengkapi daftar ini, sementara ini dapat dilihat pada kolom yang dihitamkan merupakan media cetak yang menjadi corong cendekiawan Islam dalam menyampaikan pesan agama, kemerdekaan dan kebebasan.

Belum dianalisis lebih jauh, corak pemikiran Islam yang dibawa oleh media cetak ini, namun yang jelas pemetaan di antara surat kabar umum, surat kabar bernuansa agama Islam sejak dahulu sudah menjadi wahana informasi yang sangat penting bagi cendekiawan Islam di nusantara.

D. Media Massa Era Industri Informasi: Sebuah Pemikiran

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola industri informasi. Media massa berkembang pesat. Baik dari segi karakter kekuatan maupun jenis serta kepemilikan. Kekuatan media massa menjadi sebuah kekuasaan publik yang diraih pemilik media. Kekuasaan publik ini bisa digunakan untuk kepentingan pemilik media. Disamping itu muncul pula media sosial yang juga telah menelikung peran media massa. Namun karakter media sosial jauh berbeda dengan media massa.³⁶

³⁶Salah satu kekuatan yang membantu meruntuhkan kekuasaan Husni Mubarak di Mesir dipicu oleh media sosial yang mengabarkan tentang seorang kaki lima yang membakar diri karena tak diterima dagangannya digusur aparat. Viral media sosial menjadi sebuah kekuasaan yang mampu menggerak massa. Tentu saja didukung kekuatan lain. Penelitian lain kekuatan media sosial dari AC Neilsien. Hasil penelitian Lembaga Survei AC Neilsen 2015, media sosial menempati urutan pertama bagi publik untuk mendapatkan informasi dan beropini masyarakat dunia yang berumur 17-20 tahun, disusul televisi dan *search engine online*. Sementara, masyarakat dunia yang berumur 21-34, 35-49, masih menempati televisi urutan pertama, diikuti oleh media sosial, *search engine online* dan media online. Riset yang melibatkan 30.000 responden dari 60 negara ini untuk melihat sentimen konsumen secara global lintas generasi dengan membagi responden lima klasifikasi umur. Catatan penting dari penelitian bertajuk Neilsen *Generational Lifestyle Survei 2015* adalah, tak sampai 20 persen generasi Z (21-34) yang membutuhkan informasi melalui media cetak.

Menurut penulis, media cetak tetap tidak akan tergusur dengan berbagai media massa --- radio televisi dan online plus media sosial, mengingat karakter dokumentasinya yang begitu kuat. Fenomena media cetak tutup karena alasan ekonomi dan tidak dapat kepercayaan publik, adalah hal yang lumrah di tengah laku pasar yang memberlakukan hukum tersendiri. Mereka yang bertahan, mereka yang laku dan mengikuti selera publik.

Melihat pemetaan sementara penulis di atas, persoalan modal, sumber daya manusia, pengenalan watak jurnalisme masa kini sangat menentukan masa depan sebuah media, termasuk media cetak. Menurut penulis, apapun media massa, baik elektronik maupun cetak, hanya akan bertahan apa bila lembaga media tersebut dapat memahami watak jurnalisme. Yaitu, independen, akomodatif, balancing dan profesional. Media seperti inilah yang bisa meraih simpati publik dari semua elemen dan level.

Pengakuan mantan Pemred *Sabili* generasi awal, Zaenal Muttaqin patut disimak. Menurutnya, media Islam sering tidak membaca kepentingan umat dan redaksinya selalu gagal melawan intervensi dari pemilik modal. "Ini kelemahan banyak pemred yang mau saja diintervensi pemilik modal. Dulu sewaktu saya pegang *Sabili*, saya bilang, tidak boleh satupun yang intervensi. Sebab, nanti media bisa menjadi alat kepentingan," kata Zaenal. Menurut Zaenal, *Sabili* tidak menjadi rujukan umat lagi, karena karakter *Sabili* yang tidak mau berkomitmen dengan jalan yang telah dibuat, sebagai media yang menyuarakan aspirasi umat.

Menurut penulis, *Sabili* sudah kehilangan momentum pergerakan ketika reformasi tiba. Majalah seperti ini ketika peta politik berubah semestinya juga mengubah sikap politik redaksi. Hal ini juga sebenarnya berlaku pada *Republika* yang kini mempersempit ruang gerak dan propaganda karena segmentasi Islam yang dibawanya. Sementara, surat kabar umum mengambil jalan tengah, independen, akomodatif, sehingga tetap dipercaya termasuk dari kalangan Islam. Hal ini dilakukan *Harian Umum Kompas* dan *Media Indonesia*.

Di tengah pesta kebebasan saat ini, strategi yang memungkinkan media cetak bernuansa Islami hadir dan mampu memberi penetrasi dan propaganda ke tengah publik, tentunya harus mengikuti arus pasar dengan tetap membawa misi. Maksudnya, visi yang bersifat humanis, pluralis, multikulturalis, dikedepankan dengan tetap mengemban misi secara tersembunyi.

Apalagi sekarang, media massa di Indonesia mengalami oligopoli, dikuasai oleh beberapa orang saja. Mereka pengusaha media yang berorientasi kekuasaan bisnis³⁷ dan politik praktis. Menurut Dandhy Laksono³⁸ dan Marlyna Lim, ada segi tiga kepentingan, patronase politik, keuntungan bisnis melalui iklan dan alat kekuasaan untuk memperkokoh bisnis membuat pemilik modal berlomba-lomba untuk mengembangkan sayap media sebagai kekuatan baru. Mereka di antaranya, Hary Tanoesoedibjo (*MNC*), Surya Paloh (*Media Groups*), Keluarga Sariaatmadja (*SCTV*), Aburizal Bakrie (*TVOne*, dkk), Chairul Tanjung (*Trans Corp*), Jacob Oetama (*KOMPAS*), Dahlan Iskan (*Jawa Pos*), Erick Tohir (*Republika*), Goenawan Mohamad (*TEMPO*) dan hanya beberapa pemilik media di daerah dan elit lokal. Biasanya, setiap provinsi selalu ada pengusaha media cetak yang telah menjalankan usaha media sejak masa Orde Baru.³⁹ Selain kenyataan di atas, masih terdapat media-media asing berlisensi yang terbit, siaran dan cetak di Indonesia. Seperti yang terbaru, tahun 2014, Chairul Tanjung melalui *TransCorp*, membeli lisensi channel *CNN Indonesia*.

³⁷Menurut rilis Nielsen Advertising Information Services Indonesia, total belanja iklan di televisi dan media cetak mencapai Rp134,8 Triliun, pada tahun 2016. Lihat di <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/Pertumbuhan-Belanja-Iklan-2016-Kembali-Normal.html>, diakses Senin, 27 Maret 2017, pukul 20.00 WIB.

³⁸Dandhy Laksono, "Industrialisasi Media: Kebebasan & Kode Etik", *Makalah*, disampaikan pada pelatihan pers yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, 2012.

³⁹Hary Tanoesoedibjo (*RCTI, TPI/MNC, Global, SUN TV, Trijaya Network, Okezone.com, Koran Seputar Indonesia, Majalah Trust, Tabloid-tabloid dll. Mobile 8 – Fren, Indovision, Bhakti Investama & Insurance, PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD)(eks) Adam Air. Keluarga Sariaatmadja, Eddy Kurnadi Sariaatmadja, SCTV, Indosiar, O Channel. Aburizal Bakrie, pemegang Viva Media Groups, TV One, AN TV, Vivanews.com. Erick Tohir, Mahaka Groups, Jak TV, Alif TV, republika.co.id, Golf Digest, Gen GM, 101 FM Jakarta, Radio One. Surya Paloh, Media Groups, Media Indonesia, Lampung Pos, Tabloid Prioritas, Mediaindonesia.com, Metrotvnews.com. Chairul Tanjung, TransCorp, TransTV, Trans/7, detik.com, e-detik paper. Goenawan Mohamad, Majalah Berita Tempo, Koran Tempo, www.tempo.co, Tempo TV. Dahlan Iskan, Jawa Pos Groups, (Surabaya), 200 koran lokal (Riau Pos Group, Fajar, Pontianak Group, Radar dll), JPNN, Rakyat Merdeka Group, Rakyat Merdeka Online (RMOL), Lampu Hijau. Jakob Oetama, Kompas Gramedia Groups, Kompas, Jakarta Post, Kompas.com, Tribune News, KompasTV (9 tv lokal), Tabloid Bola, Kontan dan Intisari. James Riady, Suara Pembaruan, The Jakarta Globe, Investor Daily, Globe Asia, BeritaSatu TV, Beritasatu.com, First Media (tv berbayar & internet).*

Tidak ada yang keliru atas kepemilikan media massa dari pengusaha pada modal, namun dalam perjalanan media massa sebagai industri informasi, peran media bergeser dari landasan ideal ke landasan komersial. Laku industri mendahului kepentingan komersial dari pada kepentingan ideal. Padahal, kepentingan ideal tersebut menaungi kepentingan publik tentang informasi yang layak. Lembaga pers mendapatkan kepercayaan (*trust*) publik atas informasi yang diberikan. Kepercayaan itulah yang ditawarkan kepada pengiklan. Melalui pemuatan iklan tersebutlah lembaga pers mendapatkan keuntungan.⁴⁰

Industri pers menghadapi tekanan kepemilikan atas tuntutan komersialisme yang meminggirkan idealisme pers. Disamping itu, tingkat profesionalisme para pekerja pers. Menurut Dewan Pers, profesionalisme di dunia pers di Indonesia hanya berada pada angka 25 persen. Sebanyak 567 lembaga pers (75 persen) tidak profesional karena berbagai hal, di antaranya: kualitas produks jurnalistik yang tidak berbobot, tidak memiliki badan hukum yang jelas, persoalan etika dan sebagainya.⁴¹

Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etik Pers dari Dewan Pers, Imam Wahyudi menyebutkan, pertumbuhan perusahaan media tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perusahaan pers yang memadai. Sehingga yang terjadi pemerasan dan perbuatan kriminal sebenarnya banyak terjadi karena ulah wartawan abal-abal dan tidak profesional.

Dewan Pers juga menungkapkan, sebanyak 43.300 media online, hanya 211 perusahaan yang dikategorikan perusahaan pers profesional. Umumnya di daerah, media online ini justru mengeruk untung dari perilaku koruptif oknum pejabat di pemerintahan daerah. Terutama sejak pemerintah menggelontorkan dana operasional sekolah dan dana desa. Dewan pers baru saja mencoret 10 perusahaan pers dari data perusahaan pers nasional karena melanggar prinsip jurnalistik.

Pertanyaannya sekarang, di tengah dinamika media massa yang menggiurkan sebagai industri informasi, dimanakah cendekiawan muslim menyebarkan pemikiran dan melakukan gerakan melalui media? Satu dua orang cendekiawan memang ikut dan bisa dinamis mengikuti perkembangan media sehingga tetap eksis, walau tidak memiliki media sendiri. Pola begini

⁴⁰Bill Kovack & Rosentiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, (Jakarta: Pantau, 2003).

⁴¹<https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/29/078791795/dewan-pers-75-persen-media-cetak-tak-profesional> diakses, Jumat 25 Februari 2017 pukul 19.40 WIB.

harusnya diikuti oleh cendekiawan lain tanpa harus mendirikan media karena mendirikan sebuah lembaga media massa, pada saat ini bukan perkara mudah. Perlu kesiapan berbagai sisi dan strategi, tidak hanya modal semata.

Artinya, cendekiawan muslim pada saat ini, tidak memungkinkan lagi seperti cendekiawan pada masa pergerakan dan kemerdekaan. Tetapi masih memungkinkan dengan menguasai industri media yang ada. Melalui media tersebutlah, pemikiran disebar. Untuk bisa diterima oleh media industri harus pula mengikuti mekanisme industri. Artinya, tidak memiliki media massa bukanlah berarti tidak mungkin cendekiawan muslim tidak bisa melancarkan pemikirannya kepada ummat.

E. Penutup

Surat kabar di nusantara menjadi bagian dari dinamika Islam Indonesia. Berbagai pemikiran dan gerakan menjadikan surat kabar sebagai instrument. Selain digunakan oleh organisasi-organisasi massa Islam, juga digunakan partai-partai Islam. Tokoh-tokoh cendekiawan Islam juga memiliki media cetak sebagai alat propaganda. Sebelumnya, media cetak diterbitkan lebih banyak dilandasi idealisme perjuangan pemikiran dari pada dilandasi komersialisme.

Ketika perkembangan teknologi informasi dapat dinikmati publik, media cetak tetap menjadi sarana untuk menyebarkan pemikiran. Hanya saja, ada perubahan yang mendasar, ketika media massa merupakan bagian dari industri informasi dan cendekiawan muslim tidak memiliki media. Media dikuasai para pebisnis. Akibatnya, wahana informasi yang dapat memengaruhi bagi cendekiawan muslim menjadi terbatas. Hanya mereka yang mampu dan diterima oleh media saja yang bisa memberi pemikiran. Selebihnya, tidak ikut ambil bagian di media.

Perlu ada strategi baru agar cendekiawan muslim masih dapat menyebarkan pemikiran yang ke publik. Salah satu jalan, menguasai media massa industri dengan mengikuti pola industri tanpa meninggalkan misi pemikiran dan gerakan keislaman. Selain itu, pengkaderan terhadap tenaga media cetak amatlah penting agar beberapa masa ke depan, cendekiawan baru bisa menguasai media massa. []

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, New York: Cornell Modern Indonesia Project, Cornell University, 1971.
- Abidin, Mas'ood, *Ensiklopedia Minangkabau*, Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau, 2005.
- Amir, Mafri, *Historiografi Pers Islam Indonesia*, Jakarta: Quantum, 2000.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung: Mizan, 1998.
- _____, *Transmission of al-Manar Reformisme to the Malay-Indonesian World: the case of al-Imam and al-Munir*, New York & Canada, Routledge, 2006.
- Azwar, Nasrul, *Sejarah Pers Sumbar Dialih Orang Lalu*, Opini Harian Pagi Padang Ekspres, 2007.
- Banda, Harry J., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1980).
- Burhanudin, Jajat, *Ulama & Kekuasaan, Pergumulan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*, Jakarta: Mizan Publika, 2012.
- Chaniago, Danil M., *Perempuan Bergerak. Surat Kabar Soenting Melajoe 1912-1921*, *Jurnal Kafaah, Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. IV No.1 Tahun 2014
- Darwis, Yuliandre, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau 1859-1945*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Drakkard, Jane, *A Kingdom of Word: Language and Power in Sumatra*, New York: Oxford University Press, 1999.
- Dugoignon, Stephane A., Hisao, Komatsu, and Yasushi, Kosugi (ed), *Intellectuals in the Modern Islamic World, Transmission, Transformation and Communication, New Horizon in Islamic Studies*, London And New York: Routledge, 2006.
- Federspiel, Howard M, *The Persatuan Islam (Islamic Union)*, Tesis Phd. Institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal, 1966.
- <http://www.nielsen.com/id/en/press-room/2017/Pertumbuhan-Belanja-Iklan-2016-Kembali-Normal.html>, diakses Senin, 27 Maret 2017, pukul 20.00 WIB.
- <http://www.panjimas.com/news/2014/09/19/jimly-asshiddiqie-banyak-intelektual-muslim-lahir-dari-panji-masyarakat-pimpinan-rusydi-hamka/> diakses, 10 April 2016, pukul 14.28 WIB.

- <https://aji.or.id/read/sejarah.html>, dikunjungi pada 11 April 2016, pukul 11.07 WIB.
- <https://nasional.tempo.co/read/news/2016/07/29/078791795/dewan-pers-75-persen-media-cetak-tak-profesional> diakses, Jumat 25 Februari 2017 pukul 19.40 WIB
- Jasmi, Khairul, *Surat Kabar di Ranahminang, Konfigurasi yang Menakjubkan*, Jakarta: Majalah Pantau, 2002.
- Khusairi, Abdullah, "Gerakan Reformasi Berhenti di Kaki Pelangi", *Harian Umum Independen SINGGALANG*, Padang, Selasa 13 Mei 2014.
- _____, "Pers Bebas bukan Seks Bebas", *Harian Umum Independen SINGGALANG*, 7 Februari 2012.
- Kovack, Bill & Rosentiel, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Jakarta: Pantau, 2003.
- Laksono, Dandhy, *Industrialisasi Media: Kebebasan & Kode Etik*, makalah pelatihan pers yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, 2012.
- Mu'arif, *Benteng Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010.
- Naldi, Hendra, *Booming Surat Kabar di Sumatra's Westkust*, Yogyakarta: Ombak, 2008.
- Nasution, Harun, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasionalisme Mu'tazilah*, Jakarta: UI-Press, 1987.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1940*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Sunarti, Sastri, *Kajian Lintas Media, Kelisanan dan Keberaksaraan dalam Surat Kabar Terbitan Awal di Minangkabau (1859-1940-an)*, Jakarta: KPG, 2013.
- Teba, Sudirman, *Jurnalistik Baru*, Jakarta: Kalam Indonesia, 2005.
- Yasushi, Kasugi, *Al-Manar Revisited: The Lighthouse of the Islamis Revival*, New York & Canada, Routledge, 2006.